

ANALISIS PERAN PENGELUARAN PEMERINTAH TERHADAP PENINGKATAN PEMBANGUNAN MANUSIA DI WILAYAH METROPOLITAN INDONESIA

THE ROLE OF GOVERNMENT EXPENDITURE ON HUMAN DEVELOPMENT IMPROVEMENT IN THE METROPOLITAN REGION: THE CASE OF INDONESIA

Adhitya Wardhana¹, Yudha Hadian Nur², Bayu Kharisma¹, Asep Muhammad Adam¹

¹ Departemen Ilmu Ekonomi, Universitas Padjadjaran

² BP2D Provinsi Jawa Barat

adhitya.wardhana@fe.unpad.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of the government in improving human development through infrastructure, economic, health and education expenditures. Then this study analyzed the influence of government expenditures (infrastructure, economy, health and education) on indicators of education, health and per capita income. The scope of the research is 54 districts / cities in the Metropolitan area of Indonesia. The research model uses the Generalized Least Square (GLS) model of the data panel. The results showed a positive influence of all government expenditures on human development projected with the Human Development Index (HDI). Then the results of other studies showed that total government spending positively affects the average length of school (educational indicators), life expectancy (health indicators) and per capita income.

Keywords: Government Spending, HDI, Generalized Least Square

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pemerintah dalam meningkatkan pembangunan manusia melalui pengeluaran infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan. Kemudian penelitian ini menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah (infrastruktur, ekonomi, kesehatan dan pendidikan) terhadap indikator pendidikan, kesehatan dan pendapatan perkapita. Ruang lingkup penelitian yaitu 54 Kabupaten/Kota di wilayah Metropolitan Indonesia. Model penelitian menggunakan model Generalized Least Square (GLS) panel data. Hasil penelitian menunjukkan pengaruh positif seluruh pengeluaran pemerintah terhadap pembangunan manusia yang diproyeksikan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kemudian hasil penelitian lainnya menunjukkan bahwa total pengeluaran pemerintah mempengaruhi positif terhadap rata-rata lama sekolah (indikator pendidikan), angka harapan hidup (indikator kesehatan) dan pendapatan perkapita.

Kata Kunci: Pengeluaran pemerintah, IPM, *Generalized Least Square*

PENDAHULUAN

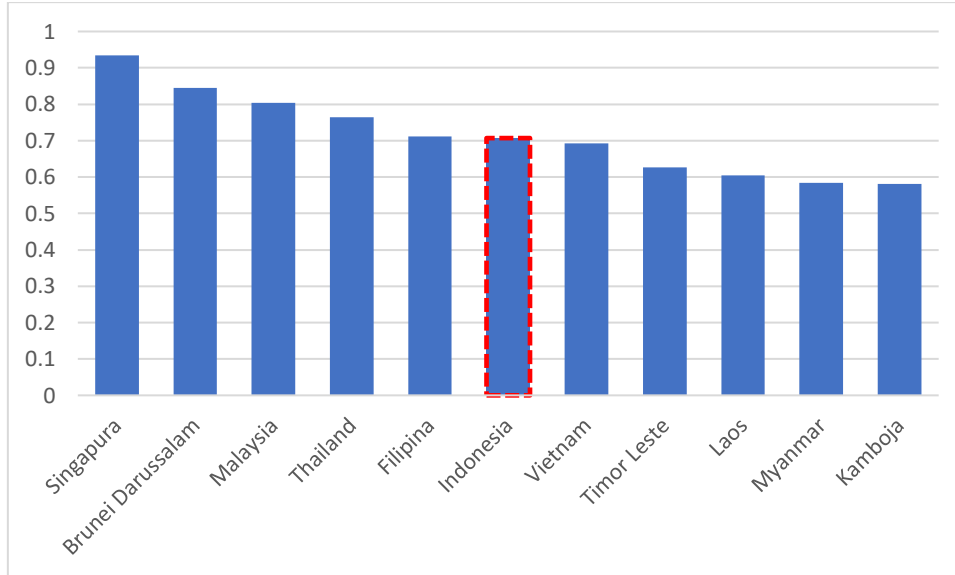
Pembangunan merupakan salah satu indikator penting yang menjadi pendorong dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pertumbuhan ekonomi akan melibatkan perubahan yang mendasar dalam struktur sosial, tingkah laku sosial bahkan institusi sosial (Todaro & Smith, 2008). Pembangunan cenderung berorientasi kepada peningkatan produksi dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kemudian pertumbuhan ekonomi tidak menjadi salah satu tujuan akhir dari pembangunan melainkan sebagai alat untuk meningkatkan beberapa tujuan dalam kerangka pembangunan salah satunya adalah

pembangunan manusia. Selanjutnya pada tahun 1990 paradigma dari pembangunan menjadi berpusat kepada aspek manusia (*human centered development*).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia, dihadapkan dengan jumlah penduduk yang besar menjadi kendala dalam proses pembangunan dan penduduk yang besar menjadi pemicu untuk pembangunan (Manik, 2015). Pertumbuhan populasi tidak hanya mencakup jumlah tetapi juga mencakup kesejahteraan dan pembangunan penduduk. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang banyak menyerap tenaga kerja dari sektor primer ke

sektor informal sehingga tidak dapat memberikan kontribusi yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi (Regina et al., 2020). Selain itu, sektor manufaktur yang memberikan potensi besar terhadap pertumbuhan masih menghadapi masalah dalam peningkatan upah tenaga kerja karena tidak diikuti oleh peningkatan produktivitas (BAPPENAS, 2019).

Hal tersebut mengindikasikan bahwa efisiensi komponen tenaga kerja di Indonesia masih rendah. Dimana hal tersebut ditunjukkan oleh nilai indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia yang masih tertinggal dengan negara tetangga seperti Singapura, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand dan Filipina (UNDP, 2020).

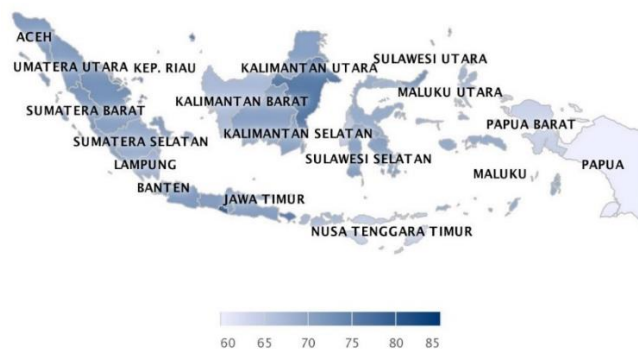


Gambar 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2018 di Asia Tenggara

Sumber: United Nations Development Programme (UNDP)

Berdasarkan Gambar 1 terlihat di negara Indonesia masih terjadi ketimpangan kualitas SDM yang didominasi oleh beberapa daerah dalam menyediakan fasilitas publik yang memadai terutama wilayah Metropolitan. Hal tersebut dapat dilihat dalam upaya peningkatan IPM di Indonesia yang dilakukan melalui kebijakan fiskal dimana pemerintah daerah mendapatkan anggaran untuk pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur dan ekonomi. Namun, dalam kenyataannya setiap

pemerintah daerah memiliki penganggaran dan kebijakan yang berbeda-beda yang menyebabkan terjadinya ketimpangan IPM di Indonesia. Sebagaimana data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada Gambar 2 menunjukkan bahwa distribusi IPM cenderung berpusat di Pulau Jawa. Fakta tersebut didorong oleh faktor ketersediaan infrastruktur dan pelayanan publik lebih baik yang ditawarkan oleh daerah-daerah yang berada di Pulau Jawa (Tjiptoherijanto, 1999).



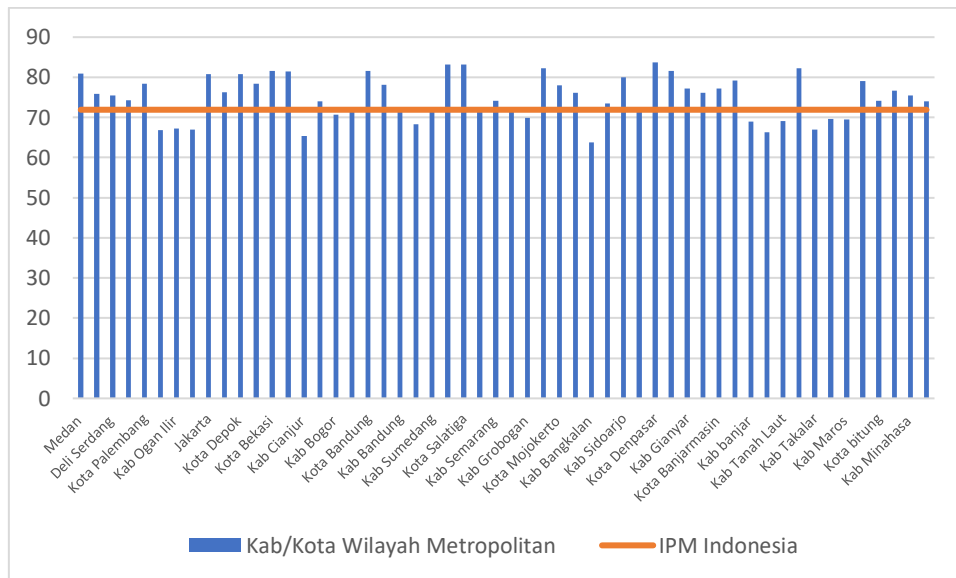
Gambar 2. Sebaran IPM di Indonesia Tahun 2018

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Kawasan metropolitan cenderung berperan sebagai pusat aktivitas dan pertumbuhan ekonomi baik pada skala internasional, nasional maupun regional. Pada wilayah metropolitan, kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan (*core city*) memiliki aktivitas ekonomi yang lebih intensif dibandingkan kota pinggiran. Dengan kondisi tersebut, kota inti akan memiliki basis pajak yang lebih besar dan mendapatkan penerimaan pajak yang tinggi untuk digunakan dalam menyediakan lebih banyak barang-barang publik dan memberikan kekuatan untuk menarik populasi ke kota inti (Prud'homme, 1995). Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk

meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan membangun kawasan metropolitan.

Kontribusi metropolitan terhadap peningkatan kualitas SDM terlihat pada Gambar 2 yang umumnya memiliki nilai IPM cukup besar. Pada Gambar 3 memperlihatkan bagaimana kondisi IPM setiap daerah yang termasuk ke dalam wilayah metropolitan di Indonesia. Beberapa daerah memiliki nilai IPM yang melebihi IPM Indonesia, tetapi secara umum masih berada di bawah IPM Indonesia. Wilayah metropolitan diharapkan dapat melakukan pemerataan pembangunan tetapi kualitas SDM yang belum merata di wilayah metropolitan menjadi salah satu tantangan.

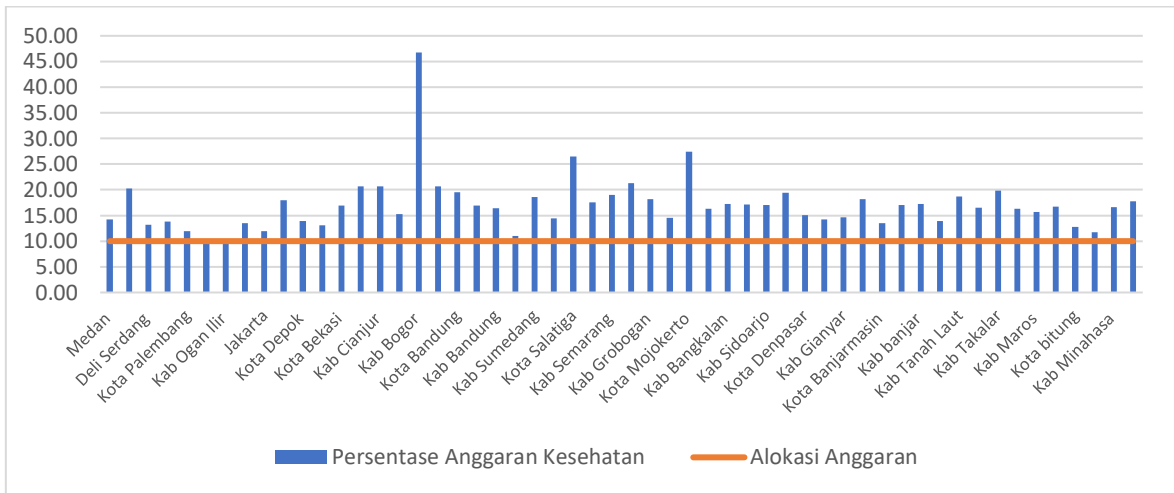


Gambar 3. Nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kab/Kota di Wilayah Metropolitan Indonesia Tahun 2019

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Wilayah Metropolitan menjadi salah satu rencana pemerintah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di wilayah luar pulau Jawa. Strategi pembangunan perkotaan di Indonesia akan berfokus kepada aglomerasi perkotaan yang akan menjadi mesin pendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan manusia. Saat ini terdapat 10 metropolitan yang tersebar di seluruh Indonesia sebagai pusat pertumbuhan, namun masih belum terdistribusi secara merata dan masih terpusat di Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan beberapa eksternalitas negatif yang berdampak kepada peningkatan IPM seperti krisis infrastruktur, fasilitas publik yang belum merata dan ketidakpastian pemerintah yang mengarah kepada proses perkembangan yang tidak berkelanjutan (Uguy, 2006).

Dalam mendukung proses pembangunan manusia di Indonesia, pemerintah pusat telah mengatur pengalokasian anggaran khususnya pada sektor kesehatan yang diatur oleh UU No 36 Tahun 2009 pasal 171 ayat 2 yang menjelaskan anggaran pemerintah untuk kesehatan minimal adalah 10% dari APBD. Sementara pada sektor pendidikan diatur oleh UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 yang menyebutkan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD. Dalam implementasinya, anggaran pada sektor kesehatan dan pendidikan di Kab/Kota pada wilayah metropolitan Indonesia secara keseluruhan memiliki anggaran yang telah mencapai batas minimum sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4 dan 5.

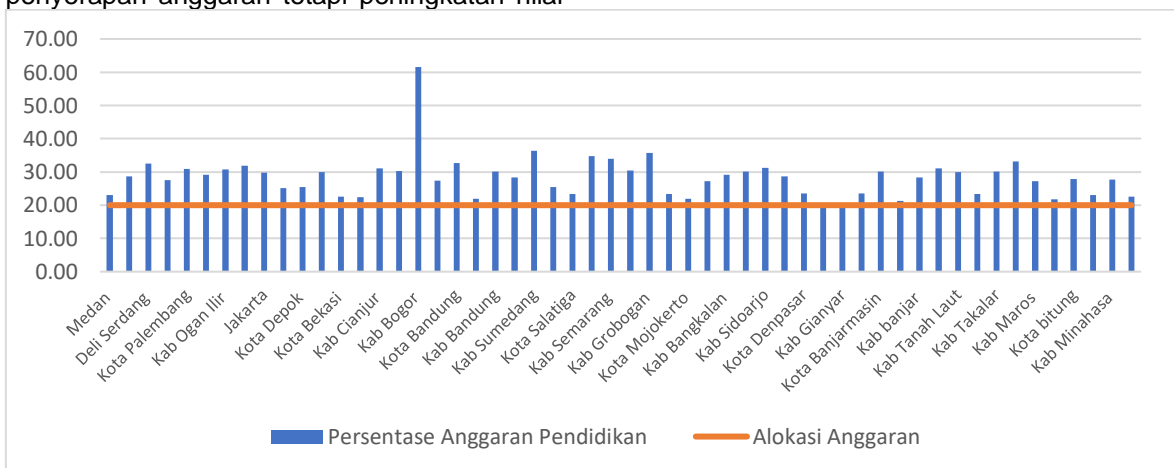


Gambar 4. Anggaran Kesehatan Kab/Kota di Wilayah Metropolitan Indonesia Tahun 2019

Sumber: DJPK, 2019

Jumlah anggaran pada sektor kesehatan dan pendidikan masih belum mampu meningkatkan nilai IPM dari Kab/Kota di wilayah metropolitan terutama daerah pinggiran yang masih berada dibawah nilai IPM nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hirarki wilayah metropolitan yaitu antara pusat pertumbuhan dan wilayah pinggiran memiliki *gap* dalam hal penyediaan infrastruktur dan manajemen alokasi anggaran (Fadilah, Ananda, & Kaluge, 2018). Meskipun anggaran kesehatan dan pendidikan terealisasi dengan baik dalam sisi penyerapan anggaran tetapi peningkatan nilai

IPM masih banyak daerah wilayah metropolitan berada dibawah nilai IPM nasional. Penyerapan anggaran kedua sektor tersebut tidak berjalan efektif disebabkan kemampuan pemerintah daerah wilayah metropolitan dalam sisi penerimaan memiliki perbedaan dalam permasalahan kualitas SDM. Hal ini menjadi salah satu permasalahan yang terjadi di setiap daerah metropolitan dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia.



Gambar 5. Anggaran Pendidikan Kab/Kota di Wilayah Metropolitan Indonesia Tahun 2019

Sumber: DJPK, 2019

Beberapa penelitian yang menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan pembangunan manusia telah dilakukan, diantaranya penelitian Jung dan Thorbecke (2003) menjelaskan pengeluaran

pendidikan berdampak positif pada pembangunan manusia. Penyediaan infrastruktur di sektor pendidikan akan membantu peningkatan kualitas pengetahuan masyarakat. Penelitian Astri et al., (2013);

Sanggalorang et al., (2015) dan Wijayanto et al., (2015) dalam Fadilah et al., (2018) menjelaskan fokus terhadap pengeluaran pemerintah pendidikan yang lebih tinggi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Penelitian dari Edeme, Nkalu, & Ifelunini (2017) menyatakan bahwa peningkatan dari pengeluaran publik dapat meningkatkan pembangunan manusia. Selain itu penelitian dari Safitri (2016), Craigwell, Bynoe, & Lowe (2012); Mohammad & Razmi (2012) menyatakan bahwa anggaran yang lebih tinggi pada sektor kesehatan mampu meningkatkan IPM. Selanjutnya penelitian dari Fadilah et al. (2018) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang berbeda dari pengeluaran pendidikan terhadap indeks pendidikan antara wilayah Kota dan Kabupaten. Wilayah kota cenderung menawarkan fasilitas lebih baik daripada wilayah kabupaten yang dapat memudahkan masyarakat untuk mengakses beberapa pelayanan pendidikan. Penelitian yang dilakukan Prasetyo & Zuhdi (2013) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah untuk kesehatan dan pendidikan tidak memiliki efektivitas dalam meningkatkan pembangunan manusia. Selain itu studi yang dilakukan oleh Lubis (2015) menemukan bahwa pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan pendidikan tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap pembangunan manusia pada 33 Provinsi di Indonesia. Hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi tersebut mengungkapkan bahwa faktor penentu IPM sangat beragam. Ketersediaan teori dan konsep dari hubungan antara pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan tidak selalu berlaku pada beberapa pengaturan (Fadilah et al., 2018). Dalam penelitian ini akan menelusuri pada sisi berbeda dari hubungan antara pengeluaran pemerintah terhadap peningkatan pembangunan manusia, dimana wilayah metropolitan menjadi fokus utama penelitian. Wilayah metropolitan terutama pusat pertumbuhan (*core city*) yang cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan fasilitas pelayanan publik yang memadai secara otomatis akan memiliki tingkat pembangunan manusia yang lebih baik. Namun, apakah kondisi tersebut juga terjadi di kota pinggiran pada wilayah metropolitan atau bahkan meningkatkan ketimpangan pembangunan manusia.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan

untuk melihat bagaimana implementasi dari pengeluaran pemerintah terhadap komponen IPM yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi di kawasan metropolitan di Indonesia.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan analisis kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap peningkatan pembangunan manusia di 54 Kab/Kota dalam 10 wilayah metropolitan Indonesia, yaitu Mebidangro, Patungraya, Jabodetabek, Bandung Raya, Kedungsepur, Gerbangkertosusila, Sarbatiga, Banjarkakula, Mamminasata dan Bimindo. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistik dari tahun 2011-2019. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan regresi data panel menggunakan model *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Adapun variabel yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, indeks pembangunan manusia (IPM), rata-rata lama sekolah (*Mean Years of Schooling*), angka harapan hidup (*Life Expectancy*) dan pendapatan perkapita dari 54 Kab/Kota yang termasuk kedalam wilayah metropolitan di Indonesia.

Pada model pertama, variabel terikat yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sementara, variabel bebas terdiri dari pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi, sektor infrastruktur, sektor kesehatan dan sektor pendidikan.

Sedangkan pada model kedua, terdiri dari tiga persamaan. Variabel terikat pada persamaan pertama adalah rata-rata lama sekolah, kedua menggunakan angka harapan hidup dan terakhir menggunakan pengeluaran perkapita. Dari ketiga persamaan tersebut, variabel bebas yang digunakan adalah total pengeluaran pemerintah dalam peningkatan pembangunan manusia.

Adapun model penelitian pertama yang digunakan adalah hasil pengembangan dari model yang digunakan oleh Edeme & Nkalu (2019). Secara matematis model tersebut dapat ditulis sebagai berikut:

$$HDI_{it} = \beta_0 + \beta_1 LEC_{it} + \beta_2 LInf_{it} + \beta_3 LHealth_{it} + \beta_4 LEdu_{it} + \varepsilon_{it}$$

HDI merupakan Indeks Pembangunan manusia, sementara *LEc*, *LInf*, *LHealth* dan *LEdu* merupakan pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan yang ditransformasikan kedalam bentuk logaritma. Selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui total pengeluaran pemerintah dalam peningkatan pembangunan manusia (*LnBudgt*) terhadap indikator dari IPM yaitu rata-rata lama sekolah (*MYS*), angka harapan hidup (*LE*) dan pengeluaran perkapita (*PI*). Model tersebut adalah sebagai berikut:

$$MYS_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnBudgt_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$LE_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnBudgt_{it} + \varepsilon_{it}$$

$$LPI_{it} = \beta_0 + \beta_1 LnBudgt_{it} + \varepsilon_{it}$$

Model diatas akan mengungkapkan bagaimana pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan indikator dari IPM di wilayah metropolitan Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada model pertama menunjukkan bahwa pengujian model terbaik yang dipilih berdasarkan Uji Hausman menunjukkan bahwa model *fixed effect* adalah model yang paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Hal tersebut ditunjukkan dengan nilai probabilitas dari coss-section random lebih kecil dari $\alpha = 0.05$ yaitu sebesar 0.0075. Selanjutnya, untuk menanggulangi masalah heterokedastisitas dan autokorelasi di dalam model panel maka digunakan metode *Generalized Least Square* (GLS) agar memberikan hasil estimasi yang tidak bias (Hsiao, 2007).

Pada model pertama akan dijelaskan bagaimana pengaruh dari pengeluaran pemerintah berdasarkan fungsinya terhadap IPM. Hasil estimasi berdasarkan Tabel 1 menunjukkan hasil estimasi dengan menggunakan *fixed effect model*. Secara keseluruhan, semua variabel bebas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi tahun sebelumnya (*LEC-1*) memiliki nilai koefisien sebesar 0.1372 dan memiliki pengaruh positif signifikan. Nilai tersebut menjelaskan bahwa setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor ekonomi sebesar 1% maka IPM akan meningkat sebesar 0.1372% dengan asumsi *ceteris paribus*. Kemudian pengeluaran

pemerintah sektor infrastruktur pada tahun sebelumnya memiliki nilai koefisien sebesar 0.2904, artinya setiap ada kenaikan 1% dari pengeluaran pemerintah pada infrastruktur maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.2904%. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan merupakan variabel yang paling mempengaruhi IPM dengan nilai koefisien sebesar 0.5012. Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan pengeluaran pemerintah pada kesehatan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.5012%. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dua tahun sebelumnya memiliki nilai koefisien sebesar 0.1647, artinya setiap kenaikan pengeluaran pemerintah pada pendidikan sebesar 1% maka akan meningkatkan IPM sebesar 0.1647%.

Berdasarkan tabel 1, menunjukkan pengeluaran kesehatan dan infrastruktur lebih berpengaruh terhadap IPM dibandingkan pengeluaran pemerintah sektor lainnya. Pada umumnya, peningkatan kualitas SDM cenderung terkonsentrasi di wilayah metropolitan dikarenakan memiliki pendapatan daerah yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah di wilayah non-metropolitan (Siddique et al., 2008). Selain itu, wilayah metropolitan yang memiliki mobilitas tinggi dalam industri membutuhkan pelayanan kesehatan yang dilengkapi pelayanan infrastruktur yang menunjang kesehatan pekerja maupun masyarakat. Mobilitas yang tinggi para pekerja di wilayah metropolitan cenderung membutuhkan sarana publik yang memadai, rendah polusi dan pemukiman dalam menunjang keberlangsungan hidup penduduk metropolitan (Oetomo, 2006). Disamping itu banyak para pekerja yang bermukim dekat dengan pusat pertumbuhan dan memiliki keluarga sehingga membutuhkan lingkungan yang sehat. Oleh karena itu pengeluaran kesehatan dan infrastruktur memiliki peran yang sentral dalam meningkatkan kualitas SDM di wilayah metropolitan. Pengeluaran kesehatan untuk kebutuhan publik dapat meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi beban penyakit (Edeme dan Nkalu, 2019). Kesehatan merupakan kebutuhan dasar penduduk untuk menciptakan kualitas modal manusia yang lebih baik. Oleh karena itu alokasi kesehatan sangat diperlukan dalam peningkatan Kesehatan (Ocampo, 1998), dimana pemerintah telah menetapkan anggaran pengeluaran untuk kesehatan minimal sebesar 5%. Hasil penelitian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yang

dilakukan oleh Fadilah et al. (2018), Mohammad & Razmi (2012), Craigwell et al. (2012) dan Kim & Lane (2013) yang menyatakan pengalokasian dana Kesehatan berpengaruh positif terhadap IPM.

Berdasarkan hasil regresi Tabel 1 bahwa pengeluaran infrastruktur memiliki pengaruh yang besar selain pengeluaran terhadap IPM dikarenakan infrastruktur di wilayah metropolitan dapat menjalankan kegiatan sosial dan ekonomi. Menurut Edeme dan Nkalu (2019) pengeluaran infrastruktur berhubungan searah dengan indeks pembangunan manusia. Pengeluaran infrastruktur dilakukan untuk kebutuhan sarana dan prasarana yang mendukung aktifitas di bidang kesehatan dan pendidikan masyarakat. Fasilitas jalan raya, listrik dan air minum di wilayah metropolitan dengan perencanaan anggaran infrastruktur akan mendukung terealisasinya target yang ditetapkan oleh pemerintah di wilayah metropolitan. Pengelolaan infrastruktur pada kawasan metropolitan secara bersama-sama di setiap daerah akan menciptakan keuntungan bersama yaitu keuntungan *spillover* dan *economic of scale* yang akan mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengeluaran infrastruktur yang efektif dan sesuai dengan wilayah metropolitan merupakan kunci dalam proses pembangunan. Selanjutnya, akan meningkatkan akses terhadap aktivitas ekonomi yang akan meningkatkan konsumsi per kapita Fadilah et al. (2018).

Peran pendidikan dapat meningkatkan kualitas SDM yang produktif dan dapat berkontribusi terhadap pembangunan di wilayah metropolitan. Perkembangan pendidikan akan meningkatkan kemampuan penduduk dalam memberikan kontribusi terhadap proses pembangunan (Edeme dan Nkalu, 2019). Pengeluaran Pendidikan yang sesuai akan berdampak positif dalam meningkatkan modal manusia (Jung dan Thorbecke, 2003). Pengeluaran Pendidikan diarahkan untuk infrastruktur pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat merupakan peran

penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Menurut Astri et al., (2013); Sanggelorang et al., (2015) dan Wijayanto et al., (2015) dalam Fadilah et al., (2018), anggaran pendidikan dapat disesuaikan dengan perencanaan sektor pendidikan seperti program wajib belajar, subsidi berupa beasiswa bagi siswa yang kurang mampu, buku, kebutuhan laboratorium dan bangunan sekolah lainnya. Hambatan dan tantangan terhadap pendidikan dapat diturunkan melalui perencanaan anggaran pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk di wilayah metropolitan.

Selanjutnya, pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi mempengaruhi signifikan terhadap IPM wilayah metropolitan Indonesia. Pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi akan mendorong kegiatan sektor riil yang memacu terhadap peningkatan pendapatan perkapita di wilayah metropolitan. Secara tidak langsung pengeluaran ekonomi memberikan kontribusi terhadap masyarakat untuk meningkatkan pendapatan dan akan berdampak terhadap perkembangan manusia dalam kesehatan dan pencapaian pendidikan. Menurut Sahn & Younger (1997), pengeluaran pemerintah di bidang ekonomi akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap bidang Kesehatan dan pendidikan yang dapat meningkatkan potensi penghasilan individu. Pengeluaran pemerintah bidang ekonomi dialokasikan untuk menyediakan lapangan kerja maupun fasilitas umum yang memberikan efek multiplier pendapatan perkapita. Selain itu, menurut Wahyudin dan Suhab (2015) menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah pada bidang ekonomi dapat meningkatkan produktivitas dan aktivitas ekonomi ditengah masyarakat dan pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 1 maka dapat dituliskan model persamaannya adalah sebagai berikut.

$$HDI_{it} = 60.3638 + 0.1372 LE_{Cit} + 0.2904 LInf_{it} + 0.5012 LHealth_{it} + 0.1647 LEdu_{it} + \varepsilon_{it}$$

Tabel 1. Hasil Regresi Model Pertama^a

Variabel	FE	RE
C	60.3638 (0.8342)	61.6179 (1.2784)
LEC (-1)	0.1372** (0.0617)	0.0875 (0.0827)
LINF (-1)	0.2904*** (0.0509)	0.2711*** (0.0786)
LHEALTH	0.5012*** (0.0230)	0.4702*** (0.0298)
LEDU(-2)	0.1647*** (0.0230)	0.1598*** (0.0365)
F-statistic	549.3133	79.5917
Prob (F-statistic)	0.0000	0.0000
R-squared	0.9932	0.5457

Keterangan. ^aStandar error dalam tanda kurung. FE = Fixed Effect, RE = Random Effect

Signifikan: ***: 0.01 **: 0.05 *: 0.10

Model berikutnya menjelaskan pengaruh pengeluaran pemerintah total (gabungan pengeluaran ekonomi, infrastruktur pendidikan dan kesehatan) terhadap rata-rata lama sekolah (MYS), angka harapan hidup (LE) dan pendapatan perkapita (LPI). Masing-masing variabel pengeluaran pemerintah secara keseluruhan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap MYS, LE dan LPI. Nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah total (LBUGT) terhadap MYS adalah sebesar 0.1866 dengan menggunakan model fixed effect (model terbaik dari hasil uji hausman). Hal tersebut dapat diartikan bahwa setiap peningkatan 1% dari pengeluaran pemerintah akan meningkatkan MYS sebesar 0,1866%. Selanjutnya nilai koefisien LBUGT terhadap LE sebesar 0.1215 dengan menggunakan model yang tepat berdasarkan hasil uji hausman yaitu random effect model. Nilai koefisien tersebut dapat diartikan bahwa peningkatan pengeluaran pemerintah sebesar 1% akan meningkatkan angka harapan hidup sebesar 0.1215%. Kemudian pengaruh pengeluaran pemerintah setiap kenaikan 1% akan meningkatkan pendapatan perkapita sebesar 0.0737%.

Berdasarkan Tabel 2 dibawah ini, pengeluaran pemerintah memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap rata-rata lama sekolah di wilayah metropolitan Indonesia. Wilayah metropolitan yang memiliki wilayah pusat pertumbuhan

mendorong peningkatan tenaga kerja yang berkualitas, sehingga pengeluaran pemerintah wilayah metropolitan cenderung lebih berdampak terhadap peningkatan rata-rata lama sekolah. Pada umumnya rata-rata lama sekolah dalam program wajib belajar 9 tahun masih banyak yang belum memenuhi pendidikan 9 tahun maka akan menjadi hambatan dalam mencapai kualitas SDM yang handal. Berdasarkan perkembangan rata-rata lama sekolah yang masih belum memenuhi capaian tersebut, pemerintah lebih fokus untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah yang sesuai dengan target capaian pendidikan. Berdasarkan UU 20 mengenai APBN TA 2020 adanya prioritas nasional pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan yang salah satunya ditujukan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas dari semua penduduk. Aliran APBN yang terlihat menunjukkan pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan penduduk di Indonesia. Beberapa penelitian menjelaskan prioritas pengeluaran pemerintah dalam meningkatkan kualitas SDM diantaranya penelitian Chakraborty (2003) menjelaskan pengeluaran pemerintah terutama pengeluaran pendidikan dan kesehatan memiliki peran besar dalam meningkatkan modal manusia. Kemudian pengeluaran pemerintah sektor publik mempengaruhi perkembangan modal manusia Paternostro et al., (2007). Menurut Edeme et al. (2017), pengeluaran pemerintah

yang terdistribusi dengan baik akan meningkatkan pembangunan manusia yang berkualitas. Peningkatan kualitas manusia akan berdampak terhadap kualitas hidup yang baik. Kualitas hidup terlihat dari komposisi pengeluaran pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hal ini dapat terlihat dari perkembangan kualitas SDM yang meningkatkan di setiap tahun.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 2 maka dapat dituliskan model persamaannya adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} MYS_{it} &= 7.5362 + 0.1866 \text{ LnBudgt}_{it} + \varepsilon_{it} \\ LE_{it} &= 69.8752 + 0.1215 \text{ LnBudgt}_{it} + \varepsilon_{it} \\ LPI_{it} &= 21.0124 + 0.0737 \text{ LnBudgt}_{it} + \varepsilon_{it} \end{aligned}$$

Tabel 2. Hasil Regresi Model Kedua^a

Variabel	MYS	LE	LPI
C	7.5362 (0.3852)	69.8752 (0.5158)	23.0124 (0.2037)
LNBDGT	0.1866*** (0.0277)	0.1215*** (0.0268)	0.0737*** (0.0146)
Hausman	32.9810***	2.8521*	5.7876**
R-squared	0.9988	0.0403	0.9094
N	486	486	486

Keterangan. ^aStandar error dalam tanda kurung.

Signifikan: ***: 0.01 **: 0.05 *: 0.10

KESIMPULAN

Pengeluaran pemerintah pada sektor ekonomi, infrastruktur, kesehatan dan pendidikan memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan manusia di 54 kabupaten/kota pada wilayah metropolitan Indonesia. Pengeluaran pemerintah yang paling mempengaruhi indeks pembangunan manusia adalah pengeluaran pada sektor infrastruktur dan kesehatan. Selain itu, total pengeluaran pemerintah memberikan pengaruh positif terhadap indikator IPM yaitu rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan pendapatan perkapita. Pengeluaran total pemerintah memberikan pengaruh paling besar terhadap rata-rata lama sekolah di wilayah metropolitan Indonesia. Rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah adalah memperkuat pengeluaran infrastruktur dan kesehatan sesuai kebutuhan setiap daerah serta mengevaluasi pengeluaran pemerintah pada sektor lainnya agar tercipta alokasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Astri, M., Nikensari, S. I., & Kuncara W., H. (2013). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah Pada Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis (JPED)*, 1(1), 77. <https://doi.org/10.21009/jped.001.1.5>
- BAPPENAS. (2019). *Rancangan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024*. Jakarta.
- Chakraborty, L. S. (2003). Public expenditure and human development: an empirical investigation. *Wider International Conference on Inequality, Poverty and Human Well-Being, Helsinki, May*, 30–31.
- Craigwell, R., Bynoe, D., & Lowe, S. (2012). The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean. *International Journal of Development Issues*, 11(1), 4–18. <https://doi.org/10.1108/14468951211213831>
- Edeme, R. K., & Nkalu, C. N. (2019). Public Expenditure and Human Development in Nigeria in The Last Decade, Composition and Distributional Impacts. *Economics and Business Letters*, 8(2), 62–73. <https://doi.org/10.17811/ebl.8.2.2019.62-73>
- Edeme, R. K., Nkalu, C. N., & Ifelunini, I. A. (2017). Article information: *International Journal of Social Economics*.

- Fadilah, A., Ananda, C. F., & Kaluge, D. (2018). A Panel Approach: How Does Government Expenditure Influence Human Development Index? *Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 10(2), 130–139.
- Hsiao, C. (2007). Panel data analysis-advantages and challenges. *Test*, 16(1), 1–22. <https://doi.org/10.1007/s11749-007-0046-x>
- Jung, H.-S., & Thorbecke, E. (2003). The Impact of Public Education Expenditure on Human Capital, Growth, and Poverty in Tanzania and Zambia: A General Equilibrium Approach. *Journal of Policy Modeling*, 25(8), 701–725.
- Kim, T. K., & Lane, S. R. (2013). Government Health Expenditure and Public Health Outcomes: A Comparative Study among 17 Countries and Implications for US Health Care Reform. *American International Journal of Contemporary Research*, 3(9), 8–13.
- Lubis, I. H. (2015). *Regional Government Budgets and Human Development Outcomes Across Indonesia's Provinces (Study Case of Provinces in Indonesia)*. (August), 2015. Retrieved from <http://weekly.cnbnews.com/news/article.html?no=124000>
- Manik, T. (2015). Analisis Pengaruh Kemakmuran, Ukuran Pemerintah Daerah, Inflasi, Intergovernmental Revenue Dan Kemiskinan Terhadap Pembangunan Manusia Dan Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*, 9(2), 107–124. Retrieved from <http://jurnal.ut.ac.id/JOM/article/view/48>
- Mohammad, S., & Razmi, J. (2012). Investigating the Effect of Government Health Expenditure on HDI in Iran. *Journal of Knowledge Management, Economics and Information Technology*, 2(5), 126–139.
- Oetomo, A. (2006). *Kelembagaan Kawasan Metropolitan*. Direktorat Jenderal Penataan Ruang: Departemen Pekerjaan Umum.
- Paternostro, S., Rajaram, A., & Tiongson, E. R. (2007). How Does the Composition of Public Spending Matter? *Oxford Development Studies*, 35(1), 47–82.
- Prasetyo, A. D., & Zuhdi, U. (2013). The Government Expenditure Efficiency towards the Human Development. *Procedia Economics and Finance*, 5(2012), 615–622. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(13\)00072-5](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(13)00072-5)
- Prud'homme, R. (1995). *The dangers of decentralization*. 10(2).
- Regina, R., Siring, B., & Arifin, A. (2020). Analysis the Effects of Poverty, General Allocation Fund and Economic Growth to Human Development Index (HDI) in Indonesia. *JURNAL ECONOMIC RESOURCE*, 3(1), 1–12.
- Safitri, I. (2016). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Infastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 66–76.
- Sahn, D. E., & Younger, S. D. (1997). Dominance Testing of Social Sector Expenditures and Taxes in Africa. *International Monetary Fund*, (April 1998), 1–23.
- Sanggalorang, S. M. M., Rumat, V. A., & Siwu, F. D. J. (2015). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Sulawesi Utara. <http://www.sulutprov.go.id/Mengenal-Sulut/Sejarah/>, 15(02), 1–11.
- Siddique, M. A. B., Wibowo, H., & Wu, Y. (2008). Economics Fiscal Decentralisation and Inequality in Indonesia: 1999-2008. *Discussion Paper 14.22*, 1–33.
- Tjiptoherijanto, P. (1999). Urbanisasi Dan Pengembangan Kota di Indonesia. *Urbanisasi Dan Perkembangan Kota Indonesia*, 10(2), 57–72. <https://doi.org/10.22146/jp12484>
- Todaro, M., & Smith, S. C. (2008). *Pembangunan Ekonomi* (Erlangga). Jakarta.
- Uguy, M. J. H. (2006). *Pengembangan Lingkungan Peri Urban yang menuju Keberlanjutan: Suatu Analisis tentang Urban Sprawl sebagai akibat Suburbanisasi*.
- UNDP. (2020). *Human Development Report 2020, The Next Frontier: Human Development and the Anthropocene*. 1–7.
- Wahyudin, A., & Suhab, S. (2015). Pengeluaran Publik dan Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan. *E-Journal Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin*, 1–13.
- Wijayanto, A., Syafitri, W., & Khusaini, M. (2015). The Analysis of Health and Educational Expenditure as Well as PDRB Per Capita's Influence on Human Development Index (Study of Cities/Regencies at East Java Province). *International Journal of Social and Local Economic Governance*, 1(2), 85–95. <https://doi.org/10.21776/ub.ijleg.2015.001.02>